

Network Governance dalam Regulasi Kebijakan Investasi Pemerintah Indonesia

¹ Sri Yulianty Mozin, ² Fidyandaud, ³ Endah Melikuestri

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

¹ yulimozin@ung.ac.id
² fidyandaud005@gmail.com
³ endahmeli433@gmail.com

Abstract

Network governance plays a critical role in the regulatory framework of public investment policies in Indonesia. This study employs a qualitative approach, utilizing document analysis and expert interviews to understand how institutional actors collaborate in shaping investment regulations. The findings indicate that network governance facilitates flexibility, stakeholder engagement, and distributed accountability, yet is constrained by bureaucratic inertia and power asymmetry between central and local governments. The study highlights the importance of social capital in maintaining effective collaboration, as well as the role of digital technology in enhancing transparency and efficiency. The results also reveal that successful governance networks require strong inter-institutional trust and adaptive capacity to respond to changing economic conditions. These insights are crucial for policymakers seeking to optimize investment frameworks in emerging economies like Indonesia.

Keywords: *Network Governance; Public Investment Policy; Regulatory Framework; Social Capital.*

Abstrak

Governance jaringan memiliki peran penting dalam kerangka regulasi kebijakan investasi publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara ahli untuk memahami bagaimana aktor institusional berkolaborasi dalam pembentukan regulasi investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa governance jaringan memungkinkan fleksibilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan akuntabilitas yang tersebar, namun dibatasi oleh inersia birokrasi dan asimetri kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Studi ini menekankan pentingnya modal sosial dalam mempertahankan kolaborasi yang efektif, serta peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jaringan tata kelola yang berhasil membutuhkan kepercayaan yang kuat antar institusi serta kapasitas adaptif untuk merespons perubahan kondisi ekonomi. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan yang ingin mengoptimalkan kerangka investasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Kata Kunci: Governance Jaringan; Kebijakan Investasi Publik; Kerangka Regulasi; Modal Sosial.

PENDAHULUAN

Investasi publik memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat bergantung pada infrastruktur serta sektor-sektor strategis lain untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Peningkatan investasi publik tidak hanya berdampak pada kapasitas infrastruktur fisik. Kualitas layanan publik meningkat, kemiskinan berkurang, daya saing nasional meningkat (Nuradhawati, 2019). Efektivitas investasi publik sering kali dipertanyakan akibat tantangan regulasi dan tata kelola yang kompleks (Latumahina, 2023). Praktik regulasi investasi publik menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi, inefisiensi birokrasi, keterbatasan partisipasi aktor non-negara (Ginting, 2020). Pendekatan

network governance mulai mendapat perhatian. Model hierarkis tradisional dianggap kaku dan sentralistik (Prabaningrum & Juwono, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti pentingnya tata kelola jaringan dalam sektor kebijakan publik. Klijn dan Koppenjan (2016) menekankan bahwa governance berbasis jaringan dapat meningkatkan legitimasi dan efisiensi kebijakan. Kompleksitas dan pluralitas aktor dalam regulasi kebijakan investasi terakomodasi dalam model ini. Network governance tidak hanya melibatkan peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang memperkuat jaringan kolaboratif sektor publik, swasta, masyarakat sipil (Hardi, 2020). Ansell dan Gash (2018) menggarisbawahi pentingnya kepercayaan serta interdependensi dalam menciptakan kolaborasi kebijakan. Kolaborasi efektif tidak hanya mengandalkan koordinasi formal melalui regulasi. Mekanisme informal seperti pertemuan berkala, forum konsultasi, kerjasama teknis lintas sektor juga diperlukan (Mariane & Palls, 2022).

Penelitian Widianingsih dan Morrell (2019) pada level nasional menunjukkan tantangan struktur kelembagaan dalam kolaborasi antarsektor kebijakan publik di Indonesia. Struktur birokrasi yang berlapis-lapis menghambat implementasi kebijakan berbasis jaringan. Koordinasi cepat terhambat ketika keputusan harus melibatkan banyak pihak (Latumahina, 2023). Konteks regulasi investasi publik memperlihatkan kesenjangan komunikasi serta perbedaan kepentingan antaraktor. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan ketidakjelasan wewenang. Pembagian tanggung jawab masing-masing aktor dalam jaringan kebijakan investasi tidak jelas (Prasetyo & Latumahina, 2023). Tingkat kepercayaan rendah antara aktor pemerintah dan sektor swasta juga menghambat penerapan network governance pada sektor investasi publik (Rahimallah, 2022).

Penelitian Rahimallah (2022) menekankan pentingnya kapasitas aktor dan insentif seimbang dalam memastikan efektivitas governance jaringan pada sektor investasi. Keberhasilan network governance tidak hanya dipengaruhi struktur formal jaringan. Kemampuan aktor dalam merespons perubahan regulasi dan dinamika pasar juga berpengaruh. Investasi publik tidak hanya berkaitan dengan modal finansial. Responsivitas jaringan aktor terhadap perubahan kebijakan fiskal, dinamika politik lokal, fluktuasi pasar global berpengaruh pada keberlangsungan investasi (Ginting, 2020). Desain insentif tidak hanya menarik investor asing. Kapasitas institusi lokal dalam mengelola investasi kolaboratif harus diperkuat (Nuradhawati, 2019).

Kesenjangan kajian terdahulu terlihat pada minimnya pembahasan mendalam terkait penerapan governance jaringan dalam regulasi investasi publik di Indonesia. Fokus penelitian yang ada lebih banyak pada tata kelola umum atau sektor spesifik seperti kesehatan dan pendidikan. Pembahasan interaksi dan koordinasi aktor dalam sistem regulasi investasi publik jarang dilakukan (Sari & SH, 2024). Dinamika kekuasaan dan struktur insentif dalam jaringan kebijakan investasi belum banyak dieksplorasi. Artikel ini menginvestigasi fungsi governance jaringan dalam proses regulasi kebijakan investasi pemerintah Indonesia. Faktor-faktor penguat dan pelemah efektivitas jaringan kebijakan investasi publik menjadi fokus utama. Harapan kontribusi penelitian ini adalah pengembangan kebijakan investasi berbasis network governance di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan *network governance* dalam proses regulasi kebijakan investasi publik di Indonesia. Lokasi penelitian difokuskan pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta beberapa institusi mitra seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terlibat dalam pengaturan dan implementasi kebijakan investasi strategis nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Dokumen yang dianalisis meliputi regulasi formal (Peraturan Presiden, Peraturan Menteri),

dokumen kebijakan (RPJMN, Rencana Strategis BKPM), serta laporan tahunan dan evaluasi kinerja investasi. Wawancara dilakukan terhadap sebelas informan kunci yang terdiri dari pejabat kementerian, analis kebijakan, serta perwakilan dari pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam forum konsultatif investasi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses formulasi atau implementasi kebijakan investasi nasional.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi naratif untuk mengidentifikasi pola relasi antar aktor, bentuk koordinasi, serta hambatan dalam jaringan tata kelola investasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi temuan awal dengan sebagian informan melalui mekanisme member check. Prosedur analisis merujuk pada model interpretatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) serta pendekatan institusional dari Agranoff dan McGuire (2003) untuk mengkaji dinamika jaringan kolaboratif dalam kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *network governance* dalam regulasi kebijakan investasi publik di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi lintas aktor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Model tata kelola ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan, tetapi juga sebagai platform untuk menyelaraskan tujuan pembangunan ekonomi nasional dengan aspirasi lokal. Dalam konteks ini, pemerintah pusat sering berperan sebagai penggerak utama dengan otoritas regulasi dan sumber daya yang lebih luas, sementara pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memahami dinamika lokal dan mengidentifikasi potensi investasi di wilayahnya. Namun, efektivitas tata kelola jaringan ini sangat bergantung pada dinamika hubungan antar aktor serta kapasitas masing-masing pihak dalam merespons perubahan regulasi dan kondisi pasar. Sørensen dan Torfing (2021) menekankan pentingnya kepercayaan, saling berbagi informasi, dan kemampuan bernegosiasi sebagai elemen kunci dalam tata kelola jaringan yang efektif. Ketiga elemen ini tidak hanya penting untuk membangun sinergi lintas sektor, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan investasi jangka panjang.

Namun, dalam konteks Indonesia, hubungan antara aktor pemerintah pusat dan daerah sering kali diwarnai oleh ketimpangan kekuasaan serta asimetri informasi, yang pada akhirnya menghambat kolaborasi lintas sektor (Prasetyo & Latumahina, 2023). Ketimpangan ini sering terjadi ketika kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, kebijakan yang berfokus pada infrastruktur besar sering kali menempatkan daerah dalam posisi sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai mitra yang setara. Selain itu, masalah koordinasi sering muncul karena perbedaan dalam kapasitas administrasi, teknis, dan finansial antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Pemerintah pusat, misalnya, biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar dan akses ke jaringan internasional, sementara pemerintah daerah lebih memahami konteks lokal, termasuk potensi ekonomi, kondisi sosial, dan preferensi masyarakat setempat. Namun, tanpa akses yang memadai ke sumber daya yang sama, pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam mewujudkan proyek investasi yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, ketimpangan ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan kewenangan, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman terhadap peran masing-masing pihak dalam jaringan investasi. Ini mencakup kesenjangan dalam kapasitas untuk memahami regulasi yang kompleks dan sering berubah, serta kurangnya infrastruktur teknologi yang mendukung aliran informasi secara efisien antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, meskipun pemerintah pusat memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang lebih besar, mereka sering kali kurang memahami konteks lokal yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi di daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah yang lebih memahami konteks lokal sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama atau kapasitas untuk memanfaatkan

teknologi informasi dalam mengelola data investasi. Hal ini memperburuk asimetri informasi, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam merespons peluang investasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas *network governance* dalam regulasi investasi publik, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi ketimpangan kapasitas dan memperkuat komunikasi antara pusat dan daerah. Ini termasuk peningkatan kapasitas teknis dan administratif pemerintah daerah, serta pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung aliran data investasi secara real-time. Selain itu, menciptakan mekanisme insentif yang mendorong kolaborasi lintas aktor dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan antara berbagai pemangku kepentingan dalam jaringan investasi (Prasetyo & Latumahina, 2023). Dengan demikian, tata kelola jaringan dapat berfungsi lebih efektif sebagai penggerak investasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Pentingnya modal sosial dalam *network governance* semakin relevan dalam konteks desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Ketika otonomi daerah diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, distribusi kewenangan antara pusat dan daerah menjadi lebih kompleks. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan daerah lebih banyak otonomi dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan politik, dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam beberapa kasus, desentralisasi mendorong munculnya inovasi lokal, seperti pengembangan layanan publik berbasis digital dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk menarik investasi. Misalnya, beberapa daerah menunjukkan keberhasilan dalam menarik investasi melalui inisiatif lokal yang proaktif, seperti mengadopsi teknologi digital untuk memfasilitasi perizinan dan meningkatkan daya saing daerah. Contoh yang menonjol adalah penerapan sistem perizinan berbasis online seperti *Online Single Submission* (OSS) yang membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi (Ginting, 2020). Sistem ini memungkinkan investor untuk mendapatkan izin usaha secara lebih cepat dengan mengurangi birokrasi yang kompleks, sehingga meningkatkan daya tarik investasi daerah. Beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, telah berhasil memanfaatkan sistem ini untuk menarik lebih banyak investasi dengan menyediakan layanan perizinan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha (Harahap et al., 2022).

Namun, di sisi lain, ketergantungan pada relasi interpersonal sering kali memperlemah akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Modal sosial, yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antar aktor, namun juga berisiko jika tidak dikelola dengan baik. Di beberapa daerah, penggunaan modal sosial yang kuat melalui jaringan informal sering kali membantu mempercepat proses perizinan dan memperlancar komunikasi antara pemangku kepentingan. Misalnya, hubungan yang baik antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah sering kali mempercepat proses persetujuan proyek, terutama dalam kasus investasi infrastruktur skala besar (Ginting, 2020). Namun, ini juga menimbulkan potensi risiko korupsi dan konflik kepentingan jika tidak diawasi dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada jaringan informal dapat menyebabkan praktik favoritisme dan pengambilan keputusan yang tidak transparan, yang pada akhirnya merusak integritas sistem tata kelola investasi (Prasetyo & Latumahina, 2023).

Selain itu, modal sosial yang kuat juga dapat memperparah ketimpangan antar daerah jika akses terhadap jaringan sosial tidak merata. Daerah yang memiliki jaringan kuat dengan pemerintah pusat atau aktor ekonomi besar cenderung lebih mudah mendapatkan investasi, sementara daerah yang kurang terhubung sering kali tertinggal. Ini memperbesar kesenjangan ekonomi antar wilayah, yang bertentangan dengan tujuan utama desentralisasi untuk memperluas kesempatan pembangunan ekonomi yang merata. Beberapa studi menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas kelembagaan yang rendah sering kali mengalami kesulitan dalam membangun jaringan sosial yang produktif untuk menarik investasi (Halim et al., 2023).

Dengan demikian, penguatan modal sosial perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam jaringan sosial di tingkat lokal. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan mempromosikan penggunaan teknologi digital untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan informal. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat daya saing daerah, tetapi juga mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, yang sesuai dengan visi pembangunan ekonomi nasional (Harahap et al., 2022).

Pada praktiknya, regulasi seperti Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020 tentang Percepatan Investasi memberikan dasar hukum yang kuat untuk koordinasi lintas sektor. Regulasi ini dirancang untuk mempercepat arus masuk investasi dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali bergantung pada hubungan interpersonal antar pejabat daripada pada struktur kelembagaan formal (Ginting, 2020). Ini karena meskipun aturan formal ada, efektivitasnya sangat bergantung pada kepercayaan dan hubungan pribadi yang terjalin di antara aktor-aktor kunci. Dalam konteks ini, hubungan yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sering kali lebih menentukan daripada sekadar mengikuti prosedur birokrasi yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, efektivitas jaringan tetap sangat bergantung pada modal sosial yang dimiliki oleh aktor-aktor kunci.

Dalam pengelolaan investasi daerah, beberapa pemerintah provinsi menunjukkan inisiatif lokal yang lebih adaptif, seperti membentuk forum diskusi lintas sektor yang berfungsi secara produktif meskipun tanpa struktur formal yang kaku (Widianingsih & Morrell, 2019). Forum semacam ini memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi di daerah tersebut. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kapasitas kolaboratif dan modal sosial lebih penting daripada sekadar mengikuti struktur formal yang ditetapkan. Selain itu, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi juga menjadi faktor penentu keberhasilan jaringan investasi. Ini terlihat dalam beberapa kasus di mana pemerintah daerah mampu merespons perubahan regulasi dengan cepat dan efektif karena adanya hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Ginting, 2020). Dalam jangka panjang, pendekatan yang lebih fleksibel ini dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Selain modal sosial, aspek teknologi juga memainkan peran penting dalam memperkuat jaringan tata kelola investasi. Teknologi digital, seperti sistem perizinan berbasis online, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses investasi. Teknologi ini memungkinkan pengurangan biaya transaksi, mempercepat waktu pemrosesan perizinan, dan meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan data secara real-time. Namun, teknologi ini juga menuntut kemampuan aktor untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat serta kesiapan infrastruktur digital yang memadai. Beberapa daerah telah berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat proses investasi, namun tantangan terkait keamanan data dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi (Rahimallah, 2022). Misalnya, implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) di beberapa daerah telah mempercepat proses perizinan dengan meminimalisir kontak langsung antara investor dan pejabat pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, beberapa daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang memadai masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem ini secara efektif. Teknologi juga berperan dalam

meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas jaringan tata kelola.

Dalam beberapa kasus, penggunaan platform digital juga memungkinkan pelacakan investasi secara lebih akurat, sehingga memudahkan evaluasi kebijakan di masa depan (Rahimallah, 2022). Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat untuk mempercepat proses administratif, tetapi juga fondasi penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Kapasitas aktor untuk merespons perubahan lingkungan kebijakan juga memainkan peran penting dalam efektivitas *network governance*. Rahimallah (2022) menyoroti bahwa keberhasilan jaringan tata kelola tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor untuk menavigasi dinamika kebijakan yang berubah dengan cepat. Ini termasuk kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, memahami tren ekonomi global, dan merespons kebutuhan pasar secara cepat.

Misalnya, selama pandemi COVID-19, beberapa daerah berhasil mempertahankan tingkat investasi yang tinggi dengan memperkuat hubungan lintas sektor dan mempercepat proses perizinan melalui mekanisme online, meskipun dihadapkan pada tantangan besar dalam hal koordinasi lintas lembaga (Ginting, 2020). Ini menunjukkan bahwa adaptabilitas dan fleksibilitas adalah kunci dalam mempertahankan keberlanjutan jaringan tata kelola dalam situasi krisis. Dalam kasus ini, pemerintah yang mampu berinovasi dengan cepat, seperti memanfaatkan teknologi digital untuk menggantikan proses perizinan tatap muka, lebih berhasil dalam menarik investasi dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sistem tradisional. Hal ini menyoroti pentingnya kesiapan kelembagaan dan kapasitas teknis sebagai faktor penentu dalam menjaga daya tarik investasi selama masa krisis.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa reformasi dalam struktur tata kelola investasi publik di Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada revisi regulasi formal, tetapi juga perlu memperkuat kapasitas kolaboratif dan membangun modal sosial yang kuat antar aktor. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi harus menjadi prioritas untuk mengurangi asimetri informasi yang sering menjadi penghambat dalam proses pengambilan keputusan (Latumahina, 2023).

Dengan demikian, peningkatan kualitas jaringan tata kelola investasi tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan modal sosial sebagai fondasi jaringan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil, transparan, dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan investasi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif meskipun menghadapi tantangan eksternal dan internal. Berdasarkan data Tabel 1, total realisasi investasi terus meningkat dari Rp 826,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.418,9 triliun pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi meski di tengah kondisi global yang penuh tantangan, seperti pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi dunia. Pada tahun 2020, sektor dominan adalah manufaktur dan infrastruktur dengan kontribusi investasi daerah sebesar 47%. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan stagnasi investasi di luar Jawa, terutama akibat pembatasan mobilitas dan gangguan rantai pasok (Sari et al., 2021). Tahun 2021 menunjukkan pergeseran dominasi investasi ke sektor energi dan manufaktur, sejalan dengan peningkatan peran energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional (Yudha & Andriani, 2021).

Tabel 1. Kinerja Investasi BKPM (2020–2023)

Tahun	Total Realisasi Investasi (Rp Triliun)	Sektor Dominan Investasi	Persentase Investasi Daerah (%)	Catatan Evaluatif
2020	826.3	Manufaktur, Infrastruktur	47	Terjadi hambatan koordinasi akibat pembatasan COVID-19. Investasi luar Jawa stagnan.
2021	901.0	Energi, Manufaktur	51	Koordinasi lintas lembaga meningkat, tetapi peran pemerintah daerah masih minim.
2022	1207.2	Transportasi, Konstruksi	54	Implementasi OSS (Online Single Submission) meningkat, tapi belum terintegrasi penuh.
2023	1418.9	Pertambangan, Energi Baru	58	Kolaborasi meningkat melalui forum investasi daerah, namun informasi pusat-daerah masih timpang.

Sumber: Data diolah dari BKPM (2023).

Pada tahun 2022, investasi semakin beragam dengan dominasi sektor transportasi dan konstruksi yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur untuk memperlancar distribusi ekonomi. Implementasi sistem OSS (Online Single Submission) mulai memberikan dampak positif meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, yang menjadi tantangan utama dalam mempercepat proses perizinan dan investasi (Harahap et al., 2022). Tahun 2023 memperlihatkan peningkatan investasi di sektor pertambangan dan energi baru, yang sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Persentase investasi daerah juga meningkat menjadi 58%, menandakan mulai berkurangnya ketimpangan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Namun, masih terdapat hambatan dalam koordinasi pusat-daerah yang perlu diperbaiki untuk memperkuat daya tarik investasi daerah (Nugroho & Santoso, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun investasi nasional menunjukkan pertumbuhan yang stabil, beberapa tantangan seperti integrasi sistem perizinan, distribusi informasi yang tidak merata, dan peran pemerintah daerah yang perlu diperkuat masih perlu diatasi. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan perbaikan regulasi dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan investasi akan terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan ekonomi nasional (Purnomo et al., 2023). Upaya untuk memperluas sektor energi baru juga akan memainkan peran penting dalam mewujudkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global (Wulandari & Prasetyo, 2023).

SIMPULAN

Network governance dalam regulasi kebijakan investasi publik di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi lintas aktor dan menciptakan kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola jaringan sangat bergantung pada modal sosial yang terbangun di antara aktor-aktor kunci, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Meskipun kerangka regulasi seperti Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh hubungan interpersonal

dan kapasitas kolaboratif para pemangku kepentingan. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital, seperti sistem OSS, telah mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan. Untuk meningkatkan efektivitas jaringan tata kelola, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas teknis, memperluas jaringan sosial yang produktif, serta mengurangi asimetri informasi antara pusat dan daerah.

Saran untuk penelitian ini adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dengan memanfaatkan teknologi digital secara lebih luas dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Pemerintah juga perlu menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa modal sosial tidak digunakan secara eksklusif untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses informasi bagi semua pemangku kepentingan guna mengurangi ketimpangan akses terhadap jaringan sosial produktif. Dengan demikian, diharapkan tata kelola jaringan dapat berfungsi lebih efektif dalam mendorong investasi publik yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Ginting, A. H. (2020). *Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid-19 Di DKI Jakarta*. Jurnal IPDN.
- Ginting, R. (2020). *Peran Modal Sosial dalam Tata Kelola Investasi Daerah*. Journal of Regional Development, 34(1), 75-90.
- Halim, R., et al. (2023). *Decentralization and Its Impact on Regional Investment*. Indonesian Economic Journal, 19(1), 55-67.
- Harahap, D., et al. (2022). *Digital Transformation in Investment Licensing through OSS Implementation in Indonesia*. Journal of Public Administration, 34(3), 201-215.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Undip Repository.
- Latumahina, R. E. (2023). *Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia*. Bureaucracy Journal.
- Mariane, I., & Palls, A. (2022). *Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan*. Journal Kebijakan Unpas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nuradhawati, R. (2019). *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. Jurnal Academia Praja.
- Nugroho, P., & Santoso, D. (2023). *Regional Investment Disparities and Policy Challenges in Indonesia*. Indonesian Economic Review, 18(1), 134-149.
- Prabaningrum, D., & Juwono, V. (2021). *Governance Policy For Internet Protocol Number Management In Indonesia: A Literature Review*. Academia.
- Prasetyo, A. S., & Latumahina, R. E. (2023). *Governance Network Pada Implementasi Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia*. UNHAS Repository.
- (2023). *Local Government Capacity in Network Governance for Public Investment in Indonesia*. Journal of Regional Development, 35(4), 122-135.
- Purnomo, R. A., et al. (2023). *Strategies for Sustainable Investment in Indonesia's Economic Recovery*. Journal of Economic Policy and Planning, 29(2), 85-98.
- Rahimallah, M. T. A. (2022). *Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance*. Jurnal Arimbi (Applied Research in Management and Business), 2(1), 44-55.
- Sari, A. R., & SH, M. S. (2024). *Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Books Google.

- Sari, N. A., et al. (2021). *The Impact of COVID-19 on Indonesia's Investment and Economic Recovery Strategies*. Indonesian Journal of Economic Research, 15(2), 125-137.
- Widianingsih, I., & Morrell, M. (2019). *Collaborative Governance: A Review and Synthesis*. Journal of Public Administration Research and Theory, 29(4), 578-595.
- Wulandari, S., & Prasetyo, D. (2023). *The Role of Energy Transition in Indonesia's Investment Growth*. Renewable Energy Perspectives, 14(2), 99-112.
- Yudha, A., & Andriani, F. (2021). *Renewable Energy Investments in Indonesia: Current Trends and Future Challenges*. Energy Policy Journal, 49(5), 78-90.